

**AKTUALISASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DALAM NAHDLATUL ULAMA
(STUDI DI PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA (PWNU)
PROPINSI JAWA TIMUR)**

Iwan Lestiono

(PPKn, FIS,UNESA) iwan.lestiono@gmail.com

I Made Suwanda

0009075708 (PPKn, FIS,UNESA) imadesuwanda@gmail.com

Abstrak

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Jawa Timur adalah organisasi sosial keagamaan yang memiliki keanggotaan terbesar di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah lebih dari 23 juta orang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan dan strategi yang diterapkan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi dan mengetahui arti penting pendidikan demokrasi bagi PWNU Propinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian ini adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur mengaktualisasikan pendidikan demokrasi yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu: (1) Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil); (2) Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil); (3) Dakwah; (4) Seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka dalam rangka memperingati hari besar Islam, Haul Kyai NU dan hari lahir Nahdlatul Ulama. Strategi pendidikan demokrasi yang dilakukan PWNU Jatim menggunakan media massa untuk membantu pendidikan demokrasi antara lain melalui Harian Umum Duta Masyarakat, majalah bulanan "AULA", dan melalui TV9. Bagi NU pendidikan demokrasi penting dalam konteks bagaimana NU mentransformasikan dirinya dari pemahaman *Ahlussunnah wal jama'ah* kepada masyarakat luas untuk menjadikan masyarakat demokratis.

Kata Kunci: *Pendidikan Demokrasi, Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Jawa Timur.*

Abstract

The Region Board of East Java Nahdlatul Ulama is a socio-religious organization which has the largest membership in East Java province, with more than 23 million people. The purpose of this research is to find out the activities and strategies East Java Nahdlatul Ulama in actualizing democratic education and know the importance of democracy education for East Java Nahdlatul Ulama. This research used a qualitative research with a design case study. Data collection techniques used observation, interviews, and documentation. Techniques of data analysis through data reduction, data presentation, and conclusions. The research results are East Java Nahdlatul Ulama actualizing democratic education in a various of activities carried out, which is: (1) Regional Summit (Konferwil), (2) Regional Employment Council (Muskerwil), (3) Dakwah; (4) Seminar, training cadres and open discussion in Islamic festivities, Haul Kyai NU and the birthday of Nahdlatul Ulama. Democracy education strategies undertaken East Java Nahdlatul Ulama using the mass media to help others through education of democracy between "Duta Masyarakat" Daily, monthly magazine "AULA", and through TV9. For East Java Nahdlatul Ulama democratic education is important in the context of how Nahdlatul Ulama transformed an understanding *Ahlussunnah wal jama'ah* to the wider community, to make a democratic society.

Keywords: *Democracy Education, Nahdlatul Ulama, The Region Board of East Java Nahdlatul Ulama.*

PENDAHULUAN

Demokrasi lahir sebagai bentuk dan wujud konsep rasionalitas dalam pengaturan sistem kemasyarakatan (komunitas masyarakat, negara, dan pemerintahan). Konsep demokrasi muncul sebagai kritik atas sejumlah model dan sistem kepemimpinan organisasi (baik organisasi pemerintahan dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya) yang memiliki identitas diktator, otoriter, dan monarki absolut. Model dan sistem tersebut mengandung inti bahwa *leadership/kepemimpinan* didominasi oleh faktor perseorangan, nasab (keturunan) dan menjadi wilayah dominan sebuah dinasti perseorangan. Disana kepemimpinan menjadi wilayah yang tertutup bagi siapapun untuk memperebutkannya.

Dalam ranah demokrasi hal itu berbanding terbalik dengan konsep ini. Dengan konsep demokrasi kepemimpinan menjadi wilayah yang terbuka bagi siapapun. Berdasar pada sebuah bentuk persamaan hak dan terjaminnya hak asasi manusia maka demokrasi melahirkan konsep bahwa kepemimpinan adalah hasil konsepsi dialogis antar semua unsur untuk memiliki posisi yang sama dalam pengaturan dan tata kelola organisasi. Jargon yang cukup terkenal dan sering terngiang dalam benak kita adalah satu bentuk konsep bahwa demokrasi adalah sebuah pola dan sistem pengelolaan organisasi yang berlandaskan pada filosofi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga demokrasi merupakan sebuah fenomena dari kesadaran kolektif sebuah komunitas masyarakat yang dalam pengaturannya melibatkan dan mempertimbangkan aspirasi ataupun perwakilan segenap unsur yang ada di dalamnya.

Belajar dari sejarah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang pernah ada beberapa puluh tahun yang lalu, demokrasi menjadi sistem alternatif yang dipilih oleh beberapa negara yang sudah maju. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Menurut Mahfud MD (2000:18) terdapat dua alasan mengapa negara lebih memilih demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, yaitu:

1. Hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental;
2. Demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peran masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Dalam demokrasi terkandung beberapa nilai yang ideal. Nilai-nilai demokrasi menurut Henry B. Mayo yang dikutip Miriam Budiardjo “... adalah nilai-nilai yang secara logika mengikuti atau timbul dari tindak tanduk sesungguhnya dari suatu sistem demokrasi.”. Sedangkan sistem demokrasi yang dimaksud disini adalah : Sistem politik yang demokratis dimana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh setiap wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam keadaan terjaminnya kebebasan politik (*A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effectif popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political freedom*). (Budiardjo, 2005:61).

Demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan saja, tetapi juga suatu gaya hidup serta tata masyarakat yang karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (*values*). Jika kemudian diperinci nilai-nilai ini bergantung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Nilai-nilai tersebut adalah *pertama* bagaimana sebuah organisasi menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*); *kedua*, bagaimana sistem penyelenggaraan pergantian pemimpin/penguasa secara teratur (*orderly succession of rules*); *Ketiga* ada upaya untuk membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*); *Keempat*, adanya pengakuan dan menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*); *kelima*, adanya unsur jaminan tegaknya keadilan; dan *keenam*, Menjamin adanya kebebasan-kebebasan dalam sistem demokrasi. (Budiardjo, 2005:62-64).

Pemahaman mengenai demokrasi di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat. Walaupun pada pelaksanaannya saat ini terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan 15 tahun yang lalu. Selain memberikan pengaruh yang positif, namun ternyata kran demokrasi yang baru saja terbuka memiliki potensi konflik dan perpecahan yang relatif tinggi. Beberapa konflik yang terjadi di Indonesia terjadi karena pihak-pihak yang terkait merasa memiliki hak dalam berpendapat dan membela diri dalam payung hukum. Hal ini terjadi karena pihak-pihak yang bersengketa bisa jadi tidak memahami konsep, prinsip, serta penerapan demokrasi yang sesungguhnya, sehingga yang terjadi justru kemunculan benih-benih anarkis di lapangan. Akibatnya, kerusakan yang ditimbulkan bukan saja

merugikan kedua belah pihak, namun masyarakat yang tidak terlibat juga menjadi korban.

Sangatlah penting untuk menyebarluaskan faham demokrasi yang ada di Indonesia (demokrasi pancasila) sebab cita-cita luhur akan terlaksana sebagaimana yang diinginkan oleh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sependapat dengan Alexis De Tocquville dalam Syaiful & Komala (2008:98) mengatakan bahwa “etos demokrasi adalah sesuatu yang dipelajari dan bukan diwariskan”. Artinya, demokrasi tidak hanya difahami dalam tatanan kognitif saja, melainkan harus dipraktikkan dalam amal perbuatan masyarakat. Nilai-nilai demokrasi jika tumbuh dan berkembang dalam perilaku keseharian warga negara maka akan mendorong perkembangan demokrasi yang mapan (*established democracy*). Sebaliknya, jika nilai-nilai tersebut tidak dikembangkan maka demokrasi berada dalam keadaan yang rentan (*fragile democracy*).

Dalam sebuah negara demokrasi tentunya tidak diinginkan apabila suatu negara berada pada *fragile democracy* atau berada pada kerentanan. Oleh karena itu, demokrasi memerlukan syarat hidupnya, yakni warga negara yang memiliki dan menegakan nilai-nilai demokrasi. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu yang lama, berat dan sulit. Oleh karena itu, secara substantif berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan Demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara.

Ada dua alasan mengapa pendidikan demokrasi merupakan kebutuhan mendesak dan penting dalam membangun budaya demokratis (*democratic culture*). Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan *political illiteracy*, yakni tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya apatisisme politik (*political apathism*) yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. (Azumardi Azra. 2001:3)

Secara esensial pendidikan demokrasi adalah untuk melahirkan "budaya demokrasi baru" dalam kerangka untuk mewujudkan tatanan demokrasi yang ideal. Demokrasi tidak sekedar dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat atau keterlibatan langsung rakyat dalam mengambil keputusan politik, namun lebih dari itu. Demokrasi di dalamnya menyangkut kondisi yang kondusif untuk mensosialisasikan pendidikan nilai-nilai yang menjadi harapan dan dambaan. Oleh karena itu demokrasi tidak hanya merujuk pada kondisi realitas tatanan atau sistem yang sudah ada, pendidikan demokrasi harus mampu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan demokrasi. Pendidikan

demokrasi dalam arti lebih spesifik dapat diartikan sebagai usaha secara sadar untuk mengubah proses sosialisasi demokrasi dalam masyarakat sehingga mereka betul-betul memahami sistem demokrasi yang ideal dan hendak diwujudkan (Nasiwan, 2004:6).

Dengan lain perkataan bahwa sistem demokrasi yang sudah ada belum sempurna sehingga diperlukan perbaikan-perbaikan melalui pendidikan demokrasi dengan tujuan agar masyarakat mempunyai pemahaman yang baru, kesadaran, sikap dan penghayatan nilai-nilai demokrasi untuk menuju kesempurnaan sebagai mana yang diidealkan dalam kehidupan berdemokrasi.

Pengembangan budaya demokrasi tidaklah menghilangkan nilai-nilai demokrasi yang sudah ada sebagaimana dalam musyawarah untuk menemukan mufakat dan telah mengakar dalam masyarakat, namun kultur demokrasi diharapkan terus dikembangkan agar menghasilkan sistem demokrasi yang lebih ideal. Usaha yang sungguh-sungguh dalam mewujudkan masyarakat demokrasi harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga dapat melahirkan budaya demokrasi yang semakin dinamis dan mendapatkan porsi perhatian lebih besar. Oleh karena pada masa rezim Sukarno, Suharto tidak memberi tempat dan kesempatan untuk lahirnya kultur demokrasi melalui inovasi-inovasi pengembangan demokrasi sehingga melahirkan sikap apatis. Kehidupan demokrasi ke depan harus dapat dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan budaya demokrasi yang ideal melalui pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi harus diupayakan melalui beragam proses baik melalui pendidikan di sekolah, keluarga atau masyarakat melalui lembaga atau organisasi sosial. Pendidikan demokrasi di masyarakat salah satunya dilakukan oleh organisasi sosial-keagamaan. Salah satu organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU). Sependapat dengan Komarudin Hidayat dalam Fuad (2006:X) bahwa :

“Organisasi masyarakat sipil menjadi aktor kunci dari proses eksplorasi gagasan dan praktik berdemokrasi. Kelompok ini juga menjadi tumpuan dari pendidikan demokrasi di kalangan publik. Peran mereka sangat signifikan di tengah proses pembenahan negara pasca otoritarianisme rezim orde baru. Salah satu organisasi tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU). Peran NU tidak bisa diabaikan peranannya untuk mensosialisasikan gagasan dan praktik berdemokrasi dilingkungan warganya dimana notabene mengklaim memiliki anggota lebih dari 30 juta orang.”

Terdapat hal yang unik dari keberadaan dan sepak terjang NU di negara ini, mulai dari sejak berdiri (1926) hingga sekarang. NU dikenal sebagai organisasi

yang moderat, yaitu sikap yang mengedepankan jalan tengah. Dalam bahasa NU, prinsip ini dikenal dengan istilah *tawassuth* yang mencakup *tawazun* (keseimbangan dan keselarasan), *i'tidal* (teguh dan tidak berat sebelah), dan *iqtiashad* (bertindak seperlunya dan sewajarnya, tidak berlebihan) (Ali Masykur Musa, 2010:vii-viii).

Peristiwa berdirinya Nadlatul Ulama (NU) juga tidak terlepas dari beberapa organisasi yang dibentuk oleh para tokoh NU, seperti Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air), Nadlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air), Taswirul Afkar (Forum Diskusi), Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Para Pedagang) dan lain-lain. Dengan terbentuknya organisasi ini, maka pada akhirnya terbentuklah juga sebuah organisasi besar yang mewadahi para ulama dan kalangan tradisionalis (pesantren). Tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 1344 H, para ulama terkemuka se Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk mendirikan sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Jamiyah Nahdlatul Ulama (NU). Inilah salah satu perjalanan dan proses NU berdiri, dengan harapan untuk mempertahankan dan memperjuangkan ajaran Islam *ahlussunnah wal jama'ah* (Aswaja).

Sikap dasar kebangsaan NU yakni keseimbangan antara *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Islam), *ukhuwah basyariah* (persaudaraan sesama manusia), dan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Pandangan NU tentang paham kebangsaan digali dari pemikiran-pemikiran politik Sunni Abad Pertengahan. Al-Ghazali dan al-Mawardi merupakan tokoh utamanya. NU melihat pandangan politik dua tokoh itu senapas dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antarmanusia, seperti sikap moderat dan cenderung memilih "jalan damai". Ini karena jalan tengah dirasa sejalan dengan tradisi Jawa yang ditandai pencarian suatu harmoni yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat (Ali Masykur Musa, 2010:ix).

Adapun salah satu konsep dari pemahaman Aswaja di sini, yaitu *tawasuth*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang dimaksud *tawasuth* (moderat) ini, sebuah sikap keberagamaan yang tidak terjebak terhadap hal-hal yang sifatnya ekstrim. *Tasamuh*, sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam. *Tawazun* (seimbang), sebuah keseimbangan sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang, dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional. *Amar ma'ruf nahi munkar*, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran (Ali Maschan Moesa. 2007:51-52).

Dari empat konsep Aswaja di atas, ada pokok

yang paling ditekankan bagaimana konsep Aswaja bisa diaplikasikan dengan baik oleh warga NU. Aswaja sebagai paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep moderat (*tawasut*), setidaknya harus memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Ahlus Sunnah Wa al-Jama'ah memiliki prinsip, bahwa hakiki tujuan hidup adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat, serta selalu mendekati diri pada Allah SWT. Untuk dapat mendekati diri pada Allah, diperlukan perjalanan spiritual, yang bertujuan memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup, namun hakikat tidak boleh dicapai dengan meninggalkan rambu - rambu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan Sunnah Rasullullah SAW. Nahdlatul Ulama dipilih karena beberapa alasan: pertama, NU adalah organisasi yang memiliki potensi yang besar jika dilihat dari jumlah anggota, program dan jaringannya dibandingkan dengan organisasi lain, khususnya di Jawa Timur. Kedua, responsif dalam perkembangan ajaran Islam berkaitan dengan urusan sosial (*muamalah*) seperti demokrasi, masyarakat madani, dan semacamnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengenai kegiatan dan strategi yang diterapkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi dan arti penting pendidikan demokrasi bagi pengurus wilayah Nahdlatul Ulama propinsi Jawa Timur. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui kegiatan dan strategi yang diterapkan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi. (2) Untuk mengetahui arti penting pendidikan demokrasi bagi PWNU Propinsi Jawa Timur.

Demokrasi

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi berkaitan dengan pengelolaan kehidupan bersama. Menurut asal usul katanya "demokrasi" berarti rakyatlah yang berkuasa, dalam bahasa Yunani "*demos*" artinya rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*cratein*" atau "*cratos*" yang berarti kekuasaan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Dede Rosyada, dkk, 2003:110).

Demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Henry B. Mayo (Budiarjo, 2005:62-64) telah mencoba merinci nilai-nilai demokrasi ini, dengan catatan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokrasi menganut semua nilai yang diperinci itu, bergantung pada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing, adapun nilai-nilai demokrasi yang dimaksud sebagai berikut :

Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*). Setiap masyarakat terdapat perselisihan pendapat serta kepentingan yang dalam alam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan-perselisihan ini harus dapat diselesaikan melalui perundingan atau dialog terbuka dalam usaha untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat.

Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in changing society*). Dalam setiap masyarakat yang memodernisasikan diri terjadi perubahan sosial, yang disebabkan faktor-faktor seperti majunya teknologi, perubahan-perubahan dalam pola kepadatan penduduk, dalam pola perdagangan dan sebagainya.

Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*). Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.

Keempat, membatasi pemakaian kekerasan secara minimum (*minimum of coercion*). Golongan-golongan minoritas yang sedikit banyak akan terkena paksaan akan lebih menerimanya kalau diberi kesempatan untuk turut serta dalam diskusi-diskusi yang terbuka dan kreatif, mereka akan lebih terdorong untuk memberikan dukungan sekalipun bersyarat, karena merasa turut bertanggung jawab.

Kelima, mengikuti serta menganggap wajar adanya keaneka ragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku. Untuk hal ini perlu terselenggaranya suatu masyarakat terbuka (*open society*) serta kebebasan-kebebasan politik (*political liberties*), yang mana akan memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya alternatif dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam hubungan ini demokrasi sering disebut suatu gaya hidup (*way of life*).

Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Dalam suatu demokrasi umumnya pelanggaran terhadap keadilan tidak akan terlalu sering terjadi, oleh karena golongan-golongan terbatas diwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan, tetapi tidak dapat dihindarkan bahwa beberapa golongan akan merasa diperlakukan

tidak adil. Maka yang dapat dicapai secara maksimal ialah suatu keadilan yang relatif (*relative justice*). Keadilan yang dapat dicapai barangkali lebih bersifat keadilan dalam jangka panjang.

Zamroni (Dede Rosyada, dkk, 2003:113) mengajukan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Toleransi.
- b. Kebebasan mengemukakan pendapat.
- c. Menghormati perbedaan pendapat.
- d. Memahami keanekaragaman dalam masyarakat.
- e. Terbuka untuk berkomunikasi.
- f. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia.
- g. Saling menghargai.
- h. Kebersamaan.
- i. Percaya diri.
- j. Mampu mengekang diri.
- k. Tidak menggantungkan diri pada orang lain.
- l. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi menurut Winataputra dan Budimansyah, (2007:210) adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat.

Sementara itu gagasan pendidikan demokrasi menurut Fuad Fachrudin (Fuad, 2006:43-45) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan kapabilitas pemikiran dan partisipasi masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara demokratis dalam berbagai segi kehidupan. (Naval, Print & Veldhuis, 2002). Naval, Print & Veldhuis menekankan pada proses membuat masyarakat menjadi demokratis. Pendidikan ini memberi kesempatan untuk meraih (a) Pengetahuan, (b) keterampilan, (c) sikap, dan (d) nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya demokratis.
- 2) Memberikan seperangkat nilai-nilai inti demokrasi atau sikap demokratis seperti menghormati perbedaan yang masuk akal, pandangan berbeda dan harga diri manusia, menghargai hak minoritas, sikap peduli terhadap orang lain, keadilan, partisipasi, kebebasan sebagai syarat warga negara untuk menciptakan masyarakat demokratis, saling menghormati, kerjasama, pentingnya hukum, dan fasilitas individual dalam membuat penilaian politis terhadap isu kontroversial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diperlukan untuk membentuk

dan mempertahankan komunitas atau masyarakat demokratis. (Dyneson, 2001)

- 3) Mengajarkan bagaimana menggunakan konsep demokrasi dalam pengertian bentuk pemerintahan, khususnya pemerintahan demokratis. Pendidikan demokrasi memberikan pengetahuan dan kapabilitas bagi masyarakat yang dibutuhkan untuk memahami dan mendukung penerapan pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia. Pendidikan tersebut juga mengajarkan masyarakat tentang apa demokrasi itu. (Patrick, 2000:20)
- 4) Membentuk warga negara “politik” : warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi dan mendukung nilai-nilai demokrasi dan menjadi warga negara yang efektif atau terpelajar secara politik. (Conley, 1993;Pring, 1999)

Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dalam pendidikan demokrasi ada dua hal yang harus ditekankan, demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praksis. Sebagai konsep berbicara mengenai arti, makna dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, sedang sebagai praksis sesungguhnya demokrasi sudah menjadi sistem. Sebagai suatu sistem kinerja demokrasi terikat suatu peraturan main tertentu, apabila dalam sistem itu ada orang yang tidak mentaati aturan main yang telah disepakati bersama, maka aktivitas itu akan merusak demokrasi dan menjadi anti demokrasi (Sunarso, 2008:67).

Pendidikan demokrasi dilakukan bersama-sama sehingga pendidikan antara di sekolah, rumah dan masyarakat saling mendukung untuk membentuk kehidupan yang lebih demokratis. Apabila guru, orang tua murid, pemuka agama, pemuka masyarakat, elit politik, dan pejabat memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dengan konsep “*Ingarso sung tuladho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*” artinya seorang pemimpin yang baik bisa memberi keteladanan atau menjadi panutan bagi yang dipimpinnya, ditengah-tengah lingkungannya menjadi penggerak untuk mencapai tujuan, sedang jika dibelakang memberi dorongan, petunjuk atau memberi motivasi bagi yang dipimpinnya sehingga sasarannya dapat dicapai. Konsep pendidikan demokrasi di atas tidak hanya sebagai wacana tetapi harus diaktualisasikan ke dalam kehidupan nyata, sehingga pendidikan demokrasi bisa mewujudkan masyarakat sipil yang dicita-citakan.

Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir sebagai representatif dari ulama tradisional, tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi. Namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti *haul*, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.

Berdinya Nahdlatul Ulama diprakarsai oleh lima belas kiai terkemuka, mereka berkumpul di rumah K.H. Wahab Hasbullah di Kertopaten Surabaya, sebagian besar mereka datang dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Jarang terjadi kiai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, namun dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk mempertahankan kepentingan mereka dalam bentuk Islam tradisional yang mereka praktekkan setelah melalui diskusi, mereka memutuskan Nahdlatul Ulama tersebut untuk mewakili dan memperkokoh Islam tradisional di Hindia Belanda. Keputusan ini merupakan langkah bersejarah karena merupakan organisasi yang berskala Nasional (Fealy, 2003:21-22). Nahdlatul Ulama didirikan oleh sejumlah tokoh ulama tradisional dan usahawan Jawa Timur, pembentukannya sebagai reaksi satu sisi terhadap berbagai aktivitas kelompok Reformis, Muhammadiyah, dan kelompok modernis moderat yang aktif dalam gerakan politik, Sarekat Islam, sisi lain terhadap perkembangan politik dan paham keagamaan tingkat internasional, oleh karenanya ada tiga penyebab lahirnya Nahdlatul Ulama, yaitu (1) gerakan pembaharu di Indonesia (2) kepentingan Politik atau (3) perkembangan timur tengah (Shobron, 2003:37-38).

Adapun dari segi religius dan spiritualitas, proses berdirinya Nahdlatul Ulama melalui *istikharah* dan permohonan kepada Allah. K.H. As'ad Syamsul Arifin yang mempunyai peran penting sebagai mediator dari dimensi spiritual dan proses berdirinya Nahdlatul Ulama. Beliau menggambarkan betapa beratnya mendirikan *jamiyyah* ulama, hingga K. H. Kholil Bangkalan perlu dua kali Mengutus dirinya pergi ke Tebuireng Jombang untuk menyampaikan sesuatu (pelambang-pelambang) Kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak melalui Proses administratif melainkan melalui permohonan kepada Allah. Ketika itu K.H. Wahab memberikan usulan kepada K.H. Hasyim untuk membentuk jam'iyah para ulama, K.H. Hasyim As'ari minta petunjuk kepada Allah, namun petunjuk tersebut tak kunjung tiba, akan tetapi petunjuk itu *malah* datangnya dari sang guru K.H. Kholil Bangkalan. K.H. As'ad berperan sebagai mediator untuk

mengantarkan *Isyarah* dari K.H Kholil kepada K.H. Hasyim Asy'ari. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1924, beliau disuruh menyampaikan sebilah tongkat disertai pesan dari al-Quran surat Thaha ayat 17-23, setelah sampai dihadapan K.H. Hasyim As'ari, K.H. As'ad Dan pada tahun 1925 beliau disuruh menghantarkan sebuah tasbih dan serta bacaan Asmaul Husna *Ya Jabbar dan Ya Qohhar* tiga kali kepada K.H Hasyim, inilah proses dari dimensi spiritual tentang berdirinya Nahdlatul Ulama.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan, ke-Islaman organisasi ini dirintis para kiai yang berpaham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sebagai wadah usaha mempersatukan diri dan menyatukan langkah dalam tugas memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dengan merujuk salah satu imam madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta berkhidmat kepada bangsa, Negara dan umat Islam (Moesa, 1999:86).

Pengertian *Ahlussunnah Wal Jama'ah* (Aswaja) dapat dilihat dari dua aspek penting, pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, Aswaja berasal dari bahasa Arab *ahl* artinya keluarga, famili, *al-sunnah*, berarti jalan, tabi'at dan perilaku kehidupan, sedangkan *al-jama'ah*, berarti sekumpulan. (Munawwir, 1997:46,209,669)

Menurut pengertian istilah (terminologi) *ahl al-sunnah*, berarti penganut sunnah Nabi Muhammad saw., yaitu mengikuti apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad saw. baik berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan (*taqrir*). Sedangkan *al-jama'ah* berarti penganut i'tiqad para sahabat Nabi, yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah pada masa *khulafa' al-rashidin* (Abu Bakr al-Siddiq, 'Umar, 'Uthman, dan 'Ali). (Aziz RS, 1995:7) Jadi, yang dimaksud dengan Aswaja adalah kaum yang mengikuti amaliah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya.

Umat Nabi Muhammad terpecah menjadi 73 golongan yang kesemuanya masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat dan masuk surga, meskipun ada hadist lain yang menyebutkan bahwa umat Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 72 golongan, akan tetapi yang selamat dalam hadist dimaksud tetap satu, yaitu golongan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad saw. dan jejak para sahabatnya, yang disebut sebagai *Ahlussunnah wal Jamaah*, dan diakronimkan dengan istilah Aswaja. Untuk selanjutnya, karena yang selamat hanya satu maka semua golongan yang ada dalam sejarah Islam mengaku sebagai golongan *Ahlussunnah wal Jamaah*, sehingga Aswaja disebut juga sebagai *al-saw.ad al-a'zam* (golongan terbesar). (Thoha, 1994:4)

Garis tegas yang diberikan oleh Rasulullah saw. dalam beberapa hadist di atas adalah sabda beliau yang

berbunyi "*Ma Ana 'Alaihi wa Ashabi*", bahwa yang selamat adalah mereka yang mengikuti apa-apa yang datang dari Rasulullah saw. Dan apa-apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi, Khulafa' al-Rasyidin yang empat, para pengikutnya dan para penerusnya. Golongan inilah yang selamat dari siksaan api neraka, yang disebut golongan *Ahlussunnah wal Jamaah*. Mereka tidak saling mengkafirkan di antara kaum muslimin dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat dari para sahabat Nabi yang lain.

Sikap dasar kebangsaan NU yakni keseimbangan antara *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama Islam), *ukhuwah basyariah* (persaudaraan sesama manusia), dan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Pandangan NU tentang paham kebangsaan digali dari pemikiran-pemikiran politik Sunni Abad Pertengahan. Al-Ghazali dan al-Mawardi merupakan tokoh utamanya. NU melihat pandangan politik dua tokoh itu senapas dengan watak orang Jawa yang mementingkan keselarasan hubungan antarmanusia, seperti sikap moderat dan cenderung memilih "jalan damai". Ini karena jalan tengah dirasa sejalan dengan tradisi Jawa yang ditandai pencarian suatu harmoni yang dicita-citakan dalam kehidupan masyarakat (Ali Masykur Musa, 2010:ix).

Nahdlatul Ulama (NU) adalah jam'iyah yang didirikan oleh para Kiai Pengasuh Pesantren. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya adalah : a) memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang menganut pola madzhab empat : Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali; b) mempersatukan langkah para Ulama dan pengikut-pengikutnya; dan c) melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.

Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah ajaran sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah Hadits yang artinya : "Kaum Yahudi tergolong-golong menjadi 71, kaum Nasrani menjadi 72, dan umatku (umat Islam) menjadi 73 golongan. Semua golongan masuk neraka kecuali satu. Para Sahabat bertanya : "Siapa satu yang selamat itu ya Rasulullah"? Rasulullah menjawab : "Mereka adalah *Ahlussunnah wal Jama'ah* (penganut Sunnah dan Jama'ah)". Apakah *Ahlussunnah wal Jama'ah* itu ya Rasulullah"? Rasulullah menjawab : "*Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah apa yang aku (Nabi) berada di atasnya bersama sahabatku".

Jadi Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah ajaran (wahyu Allah) disampaikan Nabi Muhammad SAW. kepada sahabat-sahabat-Nya dan beliau amalkan serta diamalkan para sahabat. Memang ada yang menilai hadits tersebut mengandung kelemahan. Tetapi bila

dijadikan pegangan dan pedoman untuk mengukur pandangan dan perilaku yang dapat dibenarkan ajaran Islam pasti lebih baik dibanding keterangan para pakar yang belum pasti kekuatan dan kebenarannya.

Paham Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Nahdlatul Ulama mencakup aspek aqidah, syari'ah, dan akhlaq. Ketiganya, merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan Islam. Didasarkan pada *manhaj* (pola pemikiran) Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, empat Imam madzhab besar dalam bidang Fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), dan dalam bidang tasawuf menganut manhaj Imam Al-Ghazali dan Imam Abu al-Qasim al-Junaidi al-Baghdadi, seperti para imam lain yang sejalan dengan syari'ah Islam.

Ciri utama Aswaja NU adalah sikap *tawassuth* dan *I'tidal* (tengah-tengah dan atau keseimbangan). Yakni selalu seimbang dalam menggunakan dalil, antara dalil *naqli* dan dalil *aqli*, antara pendapat Jabariyah dan Qadariyah, dan sikap moderat dalam menghadapi perubahan duniawiyah. Dalam masalah fiqih sikap pertengahan antara ijtihad dan taqlid buta, yaitu dengan cara bermadzhab. Ciri sikap ini adalah tegas dalam hal-hal yang qath'iyyat dan toleran dalam hal-hal dzanniyyat. *Tawassuth* dalam menyikapi budaya ialah mempertahankan budaya lama yang masih baik dan menerima budaya baru yang lebih baik. Dengan sikap ini Aswaja NU tidak apriori menolak atau menerima salah satu dari keduanya. (Mughtar, 2007:4)

Dari empat konsep Aswaja di atas, ada pokok yang paling ditekankan bagaimana konsep Aswaja bisa diaplikasikan dengan baik oleh warga NU. Aswaja sebagai paham keagamaan yang di dalamnya mempunyai konsep moderat (*tawasut*), setidaknya harus memandang dan memperlakukan budaya secara proporsional (wajar). Karena budaya, sebagai kreasi manusia yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bisa terjamin. Budaya memiliki nilai-nilai positif yang bisa dipertahankan bagi kebaikan manusia, baik secara personal maupun sosial.

Muktamar (dulu disebut Kongres) Nahdlatul Ulama ke-13, tahun 1935, antara lain memutuskan sebuah kesimpulan, bahwa kendala utama yang menghambat kemampuan umat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan menegakkan agama adalah karena kemiskinan dan kelemahan di bidang ekonomi. Maka muktamar mengamanatkan PBNU untuk mengadakan gerakan penguatan ekonomi warga. Para pemimpin NU waktu itu menyimpulkan bahwa kelemahan ekonomi ini bermula dari lemahnya sumber daya manusianya (SDM). Mereka lupa meneladani sikap Rasulullah sehingga kehilangan ketangguhan mental. Setelah diadakan pengkajian, disimpulkan ada beberapa

prinsip ajaran islam yang perlu ditanamkan kepada warga NU agar bermental kuat sebagai modal perbaikan sosial ekonomi yang disebut Mabadi Khaira Ummah, atau langkah awal membangun umat yang baik. Di antara lima prinsip Mabadi Khaira Ummah adalah (Mughtar, 1997:37-41):

a. *Al-Shidqu*

Sebagai salah satu sifat Rasulullah SAW., *al-shidqu*, berarti jujur, benar, keterbukaan, tidak bohong, satunya hati-kata-perbuatan. Setiap warga Nahdliyin, mula-mula dituntut jujur kepada diri sendiri, kemudian kepada orang lain. Dalam mu'amalah dan bertransaksi harus memegang sifat *al-shidqu* ini sehingga lawan dan kawan kerjanya tidak khawatir tertipu. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah saat menjalankan bisnis Sayyidatina Khadijah. Dari sikap itu beliau memperoleh sukses besar. Padahal itu memang menjadi perilaku Rasulullah sepanjang hayatnya. Warga NU sebagai pengikut Kanjeng Nabi Muhammad harus mengikuti jejaknya. Bila melupakan dan meninggalkannya, pasti akan merugi dan menderita kegagalan. Sikap *al-Shidqu* itu terbukti juga bagian penting dari kunci sukses bagi kegiatan perekonomian modern saat ini.

b. *Al-Amanah wa al-Wafa' bi al-'Ahd*

Dapat dipercaya memegang tanggung jawab dan memenuhi janji. Amanah juga satu sifat Rasul. Merupakan hal penting bagi kehidupan seseorang dalam pergaulan memenuhi kebutuhan hidup. Sebelum diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad mendapat gelar al-Amin dari masyarakat karena diakui sebagai orang yang dapat disertai tanggung jawab. Satu di antara syarat warga NU agar sukses dalam kehidupan harus terpercayanya dan menepati janji serta disiplin memenuhi agenda.

Bila orang suka khianat dan ingkar janji, pasti tidak dipercaya oleh kawan kerja dan relasi. Pelanggan akan memutus hubungan, dan kawan kerja akan menjauh. Al-Amanah dan al-Wafa bi al-'Ahd memang merupakan bagian penting bagi keberhasilan perekonomian. Dan itulah sikap para profesional modern yang berhasil pada masa kini.

c. *Al-'Adalah*

Berarti bersikap adil, proporsional, obyektif, dan mengutamakan kebenaran. Setiap warga Nahdliyin harus memegang kebenaran obyektif dalam pergaulan untuk mengembangkan kehidupan. Orang yang bersikap adil meski kepada diri sendiri akan dipandang orang lain sebagai tempat berlindung dan tidak menjadi ancaman. Warga Nahdliyin yang bisa menjadi pengayom bagi masyarakatnya sekaligus memudahkan dan membuka jalan kehidupannya. Sikap adil juga merupakan ciri utama penganut Sunni-Nahdliyin dalam kehidupan bermasyarakat. Dan bila ini benar-benar mampu menjadi karakter Nahdliyin, berarti juga wujud dari prinsip risalah

kenabian rahmatan li al-'alamin, yang berarti bukan hanya manfaat bagi diri sendiri atau golongan, tapi penebar kasih sayang buat semua orang. Ini penting bagi sukses seseorang dalam mengarungi kehidupan.

d. *Al-Ta'awun*

Artinya tolong-menolong, atau saling menolong di antara sesama kehidupan. Ini sesuai dengan jatidiri manusia sebagai makhluk social, yang dia tidak bisa hidup tanpa kerjasama dengan makhluk lain : sesama manusia, dengan binatang, maupun alam sekitar. Setiap warga Nahdliyin harus menyadari posisinya di tengah sesama makhluk, harus bisa menempatkan diri, bersedia menolong dan butuh pertolongan. Dalam agama Islam, tolong-menolong merupakan prinsip bermu'amalah. Karena itu, dalam jual-beli misalnya, kedua belah pihak harus mendapat keuntungan, tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan. Sebab prinsipnya ta'awun : pembeli menginginkan barang, sedang penjual menginginkan uang. Bila setiap bentuk mu'amalah menyadari prinsip ini, mu'amalah akan terus berkembang dan lestari. Jalan perekonomian pasti akan terus lancar bahkan berkembang. Bila prinsip ta'awun ditinggalkan, satu pihak akan menghentikan hubungan dan mu'amalah akan mengalami kendala.

e. *Al-Istiqamah*

Istiqamah adalah sikap mantap, tegak, konsisten, tidak goyah oleh godaan yang menyebabkan menyimpang dari aturan hokum dan perundangan. Di dalam Al-Qur'an dijanjikan kepada orang yang beriman dan istiqamah, akan memperoleh kecerahan hidup, terhindar dari ketakutan dan kesusahan, dan ujungnya mendapatkan kebahagiaan. Untuk mendapatkan sukses hidup warga Nahdliyin juga harus memegang sifat konsisten ini, tahan godaan dan tidak tergiur untuk melakukan penyimpangan yang hanya menjanjikan kebahagiaan sesaat dan kesengsaraan jangka panjang. Sikap konsisten akan membuat kehidupan tenang yang bisa menumbuhkan inspirasi, inisiatif, dan kreasi mengatasi segala halangan dan kesulitan. Istiqamah menghindarkan dari kesulitan hidup dan atau mengalami jalan buntu. Istiqamah berarti berpegang teguh pada prinsip-prinsip keyakinan dan merutinkan amaliyah sesuai keyakinan tersebut.

Ahlu Sunnah Wa al-Jama'ah memiliki prinsip, bahwa hakiki tujuan hidup adalah tercapainya keseimbangan kepentingan dunia dan akhirat, serta selalu mendekatkan diri pada Allah SWT. Untuk dapat mendekatkan diri pada Allah, diperlukan perjalanan spiritual, yang bertujuan memperoleh hakikat dan kesempurnaan hidup, namun hakikat tidak boleh dicapai dengan meninggalkan rambu - rambu syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Quran dan Sunnah Rasullullah SAW. Nahdlatul Ulama dipilih karena

beberapa alasan: pertama, NU adalah organisasi yang memiliki potensi yang besar jika dilihat dari jumlah anggota, program dan jaringannya dibandingkan dengan organisasi lain, khususnya di Jawa Timur. Kedua, responsif dalam perkembangan ajaran Islam berkaitan dengan urusan sosial (*muamalah*) seperti demokrasi, masyarakat madani, dan semacamnya.

METODE

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggali informasi secara luas dan mendalam tentang berbagai kondisi yang ada dan situasi yang muncul di masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah pada pengetahuan secara unik tentang fenomena individual, organisasi, sosial dan politik. Penelitian ini dilakukan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Jawa Timur. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur dipilih karena beberapa alasan. Pertama, Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang memiliki potensi yang besar jika dilihat dari jumlah anggota, program dan jaringannya dibandingkan dengan organisasi lain. Kedua, responsif dalam perkembangan ajaran Islam berkaitan dengan urusan sosial (*muamalah*) seperti demokrasi, masyarakat madani, dan semacamnya.

Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Moleong (dalam Indrawati, 2008:22), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010:85). Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam hal ini yaitu pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai kegiatan dan strategi di dalam Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Adapun kriteria pemilihan informan tenaga pendidik yang diperlukan antara lain (1) bersedia dijadikan informan, (2) mengetahui latar belakang dan kondisi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur, (3) telah menjadi pengurus di PWNU Propinsi Jawa Timur, dan (4) mengetahui kegiatan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Maka informan dalam penelitian ini adalah wakil ketua Tanfidziyah, sekretaris dan wakil sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur.

Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, Observasi dilakukan guna mencari gambaran awal mengenai lokasi penelitian dan

menentukan informan penelitian dengan melakukan pengamatan. Selanjutnya Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan ke kegiatan yang berkaitan dengan aktualisasi pendidikan demokrasi dalam Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Wawancara terutama ditujukan kepada informan yang sesuai dengan kriteria pemilihan, maka pada penelitian ini informan yang diwawancarai yakni wakil ketua Tanfidziyah, sekretaris dan wakil sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Ketiga, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen milik sekolah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data dapat berupa foto seperti foto kegiatan, struktur pengurus dan program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur.

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2010:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data kualitatif model interaktif terdapat tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*). Reduksi data dilakukan setelah memperoleh data dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada informan di Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya memilih hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema. Tahap kedua dalam analisis data model interaktif adalah penyajian data (*data display*). Data yang semakin bertumpuk-tumpuk kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan penyajian data. Penelitian ini menyajikan teks naratif yang menggambarkan objek yang diteliti, yaitu bagaimana bentuk kegiatan dan strategi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi dan arti penting pendidikan demokrasi bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur. Tahap akhir yakni analisis data model interaktif adalah penarikan kesimpulan (*verification*). Dari data yang telah diproses pada tahap pertama dan kedua, kemudian peneliti mencoba menarik kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung (Husaini dan Purnomo, 2006:87).

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Untuk metode keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi dibedakan menjadi empat macam yaitu dengan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2011:330). Penelitian ini memanfaatkan pemeriksaan melalui sumber data. Hal itu dapat dicapai melalui cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara; dan (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

HASIL PENELITIAN

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU) di level propinsi bermula dari Konsulat yang bertugas sebagai wakil Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan membina cabang di daerahnya. Dari 11 konsulat, 3 diantaranya berada di Jawa Timur, yakni Konsulat Pasuruan yang dipimpin oleh K.H. M. Dahlan, Konsulat Malang yang dipimpin H. Iskandar Sulaiman, dan Konsulat Madura yang berada di Bangkalan, dipimpin K.H. A. Munif.

Pada tahun 1954, konsul-konsul Jawa Timur disibukkan oleh dua rencana kegiatan yang cukup besar, yaitu Mukhtamar NU ke-20 di Surabaya dan pemilihan umum yang pertama tahun 1955. Setelah berlangsungnya rapat HBNO untuk membentuk Panitia Mukhtamar ke-20, Muhammad Nur AGN terpilih sebagai ketua panitia pelaksana.

Mukhtamar NU ke-20 tahun 1954 di Surabaya mengubah struktur domisili Konsulat wilayah di Jawa Timur menjadi satu struktur dan diberi nama Majelis Konsul Jawa Timur, dalam suratnya tanggal 18 Maret 1957, Nomor 224/A/Tanf/PW/III-57 yang ditandatangani penulis II Abdul Hadi Chamdun membuat pengumuman perubahan, stempel dari kosulat PB Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur, menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.

Dalam konferensi wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang pertama dilaksanakan pada tanggal 26 – 28 September 1959 di Bondowoso, terbentuklah susunan kepengurusan PWNU Jawa Timur yang pertama, terdiri dari Rais: K.H. Mahrus Ali, Wakil Rais: K.H. Ridwan Abdullah, Ketua Tanfidziyah: K.H. Mahfudh Syamsul Hadi, Wakil Ketua I: A. Tahlim Hadi Suprpto, Wakil Ketua II: Umar Burhan, sekretaris: H. Muhammad Saleh, Wakil Sekretaris: Abdul Hadi Chamdun. Kantor PWNU Jawa Timur ditetapkan di Jalan Raya Darmo 96 Surabaya. Selama 48 tahun lamanya PWNU Jawa Timur berkantor di tempat itu. Namun karena perkembangan tata ruang kota Surabaya yang semakin tidak memungkinkan,

ditambah semakin banyak Lembaga dan Badan Otonom yang dimiliki, menyebabkan suasana kantor semakin sesak. Maka sejak tanggal 9 Muharram 1428 Hijriyah/ 29 Januari 2007 Kantor PWNU Jawa Timur pindah ke Jl. Masjid Agung Timur No. 9 Surabaya, sampai sekarang.

Bentuk kegiatan dan strategi yang diterapkan dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak H. Abdul Wahid Asa selaku wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Jawa Timur diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Jawa Timur adalah Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil) dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Seperti yang diungkapkan beliau sebagai berikut :

“kegiatan yang dilaksanakan PWNU untuk melaksanakan pendidikan demokrasi bagi masyarakat salah satunya dengan kegiatan pemilihan pengurus dalam konferwil tiap lima tahun sekali dan musyawarah tingkat wilayah yang dilaksanakan satu tahun sekali, kegiatan ini merupakan ajang pemilihan pengurus PWNU dan mempertanggungjawabkan kepengurusan yang sebelumnya. Dan dalam konferwil dan muskerwil ini dilandasi dengan nilai musyawarah mufakat.” (PWNU Jatim, 02 Mei 2013, pkl 14.30)

Pernyataan Bapak H. Abdul Wahid Asa menjelaskan Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil) dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Dalam bentuk praktisnya permusyawaratan tertinggi di tingkat PWNU adalah Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil). Dalam forum permusyawaratan inilah sejumlah kebijakan-kebijakan strategis NU dimusyawarahkan oleh segenap warga nahdliyyin. Dalam hajatan Konferwil inilah sederetan konsep dikaji, diprogramkan, diputuskan dan dievaluasi atas langkah-langkah dan perkembangan organisasi NU secara maksimal dan optimal. Forum muktamar menjadi satu bentuk media demokrasi untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang harus dijalankan oleh organisasi NU secara konsisten.

Sebagai forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah dan juga suksesi kepemimpinan PWNU, forum dipersiapkan untuk memfasilitasi perdebatan konsep dan pengkajian atas langkah strategis yang akan dijadikan ketetapan Konferwil. Pelaksanaan Konferwil merupakan ajang pemilihan ketua PWNU yang mana kegiatan ini sebagai implikasi dari pendidikan demokrasi yang dilakukan dan dijadikan momen untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan sebelumnya.

Berkaitan dengan pemilihan pengurus PWNU dilandasi dengan nilai musyawarah mufakat.

Bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi selanjutnya dituturkan oleh Bapak Dr. Ahmad Rubaidi, M.Ag yang menjabat sebagai wakil sekretaris PWNU Propinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

“selain kegiatan tahunan dan lima tahunan yang dilaksanakan dalam konferwil dan muskerwil, PWNU memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi seperti dakwah, seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka yang dilakukan PWNU dalam peringatan hari besar Islam, Haul Kyai NU dan Hari lahir NU melalui jaringan media yang dimiliki, seperti televisi dan radio. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak semua orang untuk menegakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Melalui kegiatan ini kita berupaya menyerukan, mengajak, dan mendorong fungsi-fungsi pemberdayaan masyarakat, dan membuka ruang partisipasi mereka secara optimal.” (PWNU Jatim, 15 Mei 2013, pkl 15.00)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada masyarakat yaitu Dakwah; Seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka dalam rangka memperingati hari besar Islam, Haul Kyai NU dan Hari lahir Nahdlatul Ulama.

Temuan hasil observasi peneliti yang dilakukan pada tanggal 04 Mei 2013 hingga 02 Juni 2013 tentang kegiatan yang dilakukan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur sejalan dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Pelaksanaan konferensi wilayah (konferwil) NU Jawa Timur tidak semata sebagai kegiatan rutin memilih kepengurusan baru, mengevaluasi kinerja serta mempersiapkan amanah untuk jangka waktu 5 tahun kedepan. Ada beberapa kegiatan pendukung yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan konferwil yaitu lokakarya, seminar, bhakti sosial, pawai, sepeda sehat dan jalan sehat bersama kiai, bazar, pameran lukisan, istighotsah dan gebyar sholawat.

Bukti pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang dilaksanakan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur adalah Lokakarya dengan tema “menggagas NU masa depan” yang dilaksanakan di Hotel Green SA Juanda Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2013. Kegiatan selanjutnya berupa Seminar Nasional dengan tema “potensi ekonomi islam dan praktik penegakan hukum dalam peningkatan kesejahteraan umat” yang dilaksanakan di Gedung Empire Palace pada tanggal 11 Mei 2013. Dan

yang terakhir kegiatan Seminar keagamaan dengan tema “urgensi aswaja dalam menjaga keutuhan NKRI” yang dilaksanakan di gedung PWNU Propinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwasanya kegiatan yang dilaksanakan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada masyarakat yaitu : (1) Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil); (2) Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil); (3) Dakwah yang melalui media televisi dan radio milik PWNU; (4) Seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka dalam rangka memperingati hari besar Islam, Haul Kyai NU dan Hari lahir Nahdlatul Ulama.

Adapun dalam praktiknya untuk mengembangkan gagasan demokrasi atau pendidikan demokrasi secara luas PWNU memiliki strategi yang dilakukan. Strategi yang dilakukan PWNU dalam mengembangkan warga nahdliyin dan warga lainnya sebagai warga negara yang demokratis dilakukan melalui media massa dan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWNU seperti Konferwil, Muskerwil, dakwah, seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka. Bukan semata sebagai kegiatan ritual keagamaan tetapi juga memberikan strategi pembelajaran nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara strategi yang dilakukan PWNU menurut narasumber Bapak Drs. H. Masyhudi Muchtar, MBA, sebagai berikut :

“Strategi yang dilakukan PWNU ya melalui media, selain sebagai sarana informasi dan komunikasi dengan warga nahdliyin, juga sebagai bentuk strategi pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh PWNU. PWNU kan punya kegiatan-kegiatan nah untuk mempermudah sosialisasi kegiatan itu ya melalui media antara lain TV 9, Radio seperti radio Kotak FM, Yasmara FM, dan melalui majalah seperti AULA, DUTA, dan Bangsa. Kami punya televisi lokal, radio, dan majalah yang digunakan sebagai strategi penyampaian pendidikan demokrasi, karena melalui media inilah PWNU melakukan interaksi, informasi dan komunikasi dengan masyarakat, selain itu juga untuk memberi informasi atas permasalahan yang dihadapi umat, baik sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Dari sinilah akan diketahui secara jelas akar, alur, dan konteks sebuah ajaran itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.”. (PWNU Jatim, 07 Mei 2013, pkl 11.30)

Temuan hasil observasi peneliti, PWNU Jatim menggunakan media untuk membantu pendidikan demokrasi antara lain melalui majalah bulanan “AULA” yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sejak tahun 1978. Sepuluh tahun kemudian, majalah ini mendapat Surat Izin Terbit Menteri Penerangan 1987. Penerbit majalah ini berkantor di PWNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al-Akbar Timur No.9 Surabaya. Selanjutnya Harian Umum Duta Masyarakat adalah kora harian yang diterbitkan oleh masyarakat Nahdliyin pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1954. Adapun alamat redaksi harian Duta di Gedung Astra Nawa Jl Gayung Sari timur 35, Surabaya, Jawa Timur. Harian Umum Duta Masyarakat, merupakan Koran harian yang beredar di sebagian besar kota di Jawa Timur dan Jakarta. Memiliki segmentasi pembaca yang meliputi seluruh umat muslim, mulai dari kalangan menengah sampai kebawah. Dan yang terakhir melalui TV9 yang dikelola oleh PT.Dakwah Inti Media. Perusahaan yang dimiliki organisasi sosial keagamaan PWNU Jawa Timur. TV9 telah memperoleh izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 2012 untuk melakukan siaran di kanal 42 sebagai lembaga penyiaran swasta di Surabaya/Jawa Timur. Kantor TV9 beralamatkan Jl Raya Darmo 96, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat diketahui PWNU Propinsi Jawa Timur menggunakan media massa untuk melaksanakan strategi pendidikan demokrasi. Media cetak dan elektronik memiliki keunggulan, keunggulannya antara lain mudah dijangkau oleh masyarakat. Program ini di maksudkan untuk menggali persepsi dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan melakukan interaksi, informasi dan komunikasi dengan masyarakat, selain itu juga untuk memberi informasi atas permasalahan yang dihadapi umat, baik sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada khalayak tetapi lebih karena menjalankan fungsi mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan menghibur. Dengan fungsi demikian maka media yang telah dibentuk memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat atau persepsi masyarakat terhadap sesuatu hal khususnya berkaitan dengan demokrasi.

Arti penting pendidikan demokrasi bagi PWNU Propinsi Jawa Timur.

Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep,

prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. Pendidikan demokrasi pada hakekatnya membimbing masyarakat agar semakin dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa arti penting pendidikan demokrasi bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) adalah sama halnya mengajarkan kepada masyarakat mengenai paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam Nahdlatul Ulama karena nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak H. Abdul Wahid Asa sebagai berikut :

“NU merupakan organisasi yang menerima demokrasi, Tujuan NU didirikan adalah memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi dasar nilai, spirit, dan sekaligus manhaj dalam berbagai bidang kehidupan individu dan kolektif. Dalam konteks kehidupan negara-bangsa terutama dalam pendidikan demokrasi, NU menerapkan prinsip syuro atau musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Sejak awal NU telah mengusung konsep Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang mengedepankan nilai-nilai kedamaian, harmoni, dan humanis. Dengan tata nilai moderasi dan toleransi ini, warga NU mampu beradaptasi dengan arus peradaban umat manusia yang berbeda aliran, paham, bahkan agama sekalipun.” (PWNU Jatim, 02 Mei 2013, pkl 14.30)

Pendapat dipertegas oleh Bapak Masyhudi Muchtar menyatakan bahwa :

“Nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam sikap dan prinsip dasar kemasyarakatan NU. Prinsip dasar tersebut adalah: 1) *Tawazun* (seimbang). Artinya keseimbangan antara kepentingan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. 2) *Tawassuth* (jalan tengah). Artinya dalam mengambil keputusan harus menggunakan berbagai pertimbangan dan tidak memihak sebelah. 3) *Tasamuh* (toleransi). Ini berarti sikap saling menghormati, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan. 4) *I'tidal* (lurus), selalu berjalan lurus dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama. 5) *Amar ma'ruf nahi munkar*, mengajak pada kebenaran dan mencegah pada keburukan dengan cara yang baik.”. (PWNU Jatim, 07 Mei 2013,

pkl 11.30)

Selaras juga diungkapkan oleh bapak Ahmad Rubaidi yang mengatakan bahwa :

“Bagi PWNU propinsi Jawa Timur, arti penting pendidikan demokrasi sama halnya mengajarkan kepada masyarakat mengenai paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam Nahdlatul Ulama. Karena nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam prinsip *Ahlussunnah wal Jama'ah* antara lain, yaitu *tawasuth*, *i'tidal*, *tasamuh*, *tawazun* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Yang dimaksud *tawassut* dan *i'tidal*, yaitu menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah kehidupan bersama. *Tasamuh*, sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam. *Tawazun* (seimbang), sebuah keseimbangan sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang, dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional. *Amar ma'ruf nahi munkar*, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.”. (PWNU Jatim, 15 Mei 2013, pkl 15.00).

Nilai-nilai demokrasi dalam pandangan NU tercermin dalam sikap dan prinsip dasar kemasyarakatan NU. Prinsip dasar tersebut adalah: 1) *Tawazun* (seimbang). Artinya keseimbangan antara kepentingan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. 2) *Tawassuth* (jalan tengah). Artinya dalam mengambil keputusan harus menggunakan berbagai pertimbangan dan tidak memihak sebelah. 3) *Tasamuh* (toleransi). Ini berarti sikap saling menghormati, tidak memaksakan kehendak dan menghargai perbedaan. 4) *I'tidal* (lurus), selalu berjalan lurus dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama. 5) *Amar ma'ruf nahi munkar*, mengajak pada kebenaran dan mencegah pada keburukan dengan cara yang baik.

Prinsip *tawazun* sebagai sikap yang seimbang, selaras, serasi dalam berkehidupan merupakan sebuah sikap seimbang antara keyakinan dan toleransi, bagaimana seorang muslim meyakini keyakinan agamanya tetapi disisi lain ia menyadari bahwa orang lain pula memiliki hak dalam menentukan pilihannya. Sikap tengah ini bukan berarti tidak memiliki pendirian, akan tetapi ia tetap memiliki komitmen terhadap masalah keadilan. *Tawassuth* sebagai bentuk pandangan yang melakukan sesuatu secukupnya, tidak ekstrem dan tidak liberal. *Tawassuth* bukan berarti pandangan yang tidak memiliki pendirian, akan tetapi bersikap tegas bukan keras. Sikap *tasamuh* (toleran), dipandang sebagai sebuah sikap damai dalam berdampingan dengan pihak lain yang secara aqidah, cara berfikir dan budaya yang berbeda.

I'tidal sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan berpedoman pada kaidah-kaidah agama. *Amar ma'ruf nahi mungkar*, mengajak pada kebenaran dan mencegah pada keburukan dengan cara yang baik.

Pendidikan demokrasi melalui pemahaman nilai Aswaja menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, serta dilengkapi dengan sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama.

Adapun beberapa hal penting mengapa dilakukannya pendidikan demokrasi adalah terciptanya masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang sudah mengetahui akan hak-haknya, masyarakat yang memiliki kebebasan berkreasi sesuai dengan aturan agama serta mampu menempatkan posisi pribadinya yang bisa dipertanggung jawabkan dalam aspek nilai dan menghargai posisi pihak lain sesuai norma dan etika, juga masyarakat memiliki kesempatan dan hak yang sama.

PEMBAHASAN

Bentuk kegiatan dan strategi yang diterapkan dalam mengaktualisasikan pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi sebagai upaya untuk menyebarluaskan gagasan demokrasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur (PWNU Jatim) merupakan sebuah upaya yang paling penting dalam menjadikan masyarakat yang demokratis. Terciptanya masyarakat demokratis dapat menunjang kehidupan bernegara yang baik, sebab masyarakat sudah tahu akan hak dan kewajibannya. PWNU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Jawa Timur telah melakukan beragam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi. Berikut merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang telah dilakukan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur.

Bentuk pendidikan demokrasi pertama yang dilakukan PWNU adalah melaksanakan pemilihan kepengurusan PWNU yang dilaksanakan dalam kegiatan Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil), dan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil). Konferwil merupakan kegiatan untuk memilih kepengurusan baru dalam PWNU, dan sistem yang digunakan adalah musyawarah. Prinsip musyawarah merupakan unsur esensial dalam Nahdlatul Ulama. Musyawarah dalam Nahdlatul Ulama dilakukan dengan maksud mencari kebenaran, bukan mencari kekuatan berdasarkan wibawa

atau jumlah suara terbanyak.

Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo (Budiarjo, 2005 :62-64) menjelaskan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai salah satunya menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*). Pergantian atas dasar keturunan, atau dengan jalan mengangkat diri sendiri ataupun melalui kudeta, dianggap tidak wajar dalam demokrasi.

Penyelenggaraan pergantian pemimpin secara teratur (*orderly succession of rulers*) dalam organisasi PWNU Propinsi Jatim ditunjukkan melalui kegiatan Konferensi Tingkat Wilayah yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Pemilihan Rais dan Ketua dipilih melalui musyawarah mufakat dan atau pemungutan suara. Pelaksanaan kegiatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai demokrasi menurut Zamroni. Zamroni (Dede Rosyada, dkk, 2003:113) mengajukan beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, yaitu kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, terbuka untuk berkomunikasi, kebersamaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Sebagai forum permusyawaratan tertinggi tingkat wilayah dan juga suksesi kepemimpinan PWNU, forum dipersiapkan untuk memfasilitasi perdebatan konsep dan pengkajian atas langkah strategis yang akan dijadikan ketetapan Konferwil. Kegiatan Konferwil sebagai ajang pemilihan kepengurusan di tubuh PWNU sebagai implikasi dari pendidikan demokrasi yang dilakukan. Pelaksanaan Konferwil merupakan ajang pemilihan ketua PWNU yang mana kegiatan ini selain pemilihan, sejatinya dijadikan momen untuk mempertanggungjawabkan kepengurusan sebelumnya. Berkaitan dengan pemilihan pengurus PWNU dilandasi dengan nilai musyawarah mufakat.

Bentuk Pendidikan demokrasi selanjutnya adalah Dakwah melalui media massa. Sebagai salah satu bukti adalah acara Dakwah yaitu program Hujjah Aswaja, yang ditayangkan oleh TV9 setiap hari senin pada jam 20.00 WIB. Bekerja sama dengan Aswaja NU Center Jawa Timur, program ini ditujukan untuk membincang aqidah, fikrah dan konsepsi Islam Ahlus Sunnah Wal Jama'ah serta amaliyah keagamaan sehari-hari. Dengan menghadirkan nara sumber dari pesantren dan pengurus NU serta dikemas secara interaktif telepon dengan pemirsa di rumah, menjadikan program ini banyak ditonton terutama oleh masyarakat yang ingin mengetahui asal-usul serta dasar amaliyah keagamaan yang secara kultural sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat.

Dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat

kepada Allah SWT sesuai dengan garis aqidah, syari'at dan akhlak Islam. Dakwah bertujuan untuk mempengaruhi dan mentransformasikan sikap batin dan perilaku warga masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu dan kesalehan sosial. Dakwah menjadi media yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dakwah dengan pesan-pesan keagamaan dari pesan-pesan sosialnya juga merupakan ajakan kepada kesadaran untuk senantiasa memiliki komitmen (*istiqomah*) jalan yang lurus. Melalui dakwah bertujuan memberikan gagasan demokrasi agar nilai-nilai demokrasi dapat membumi di masyarakat.

Beberapa kegiatan lain yang berkaitan tentang pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh PWNU Jatim antara lain ; Kajian kritis dan monitoring terhadap kebijakan dan pelayanan publik, Pengembangan kerjasama tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) stakeholder lain untuk pemberdayaan masyarakat, Kajian strategis isu-isu keagamaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Adapun program tersebut dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, seperti Seminar, Pelatihan, dan diskusi terbuka yang diselenggarakan di seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur. Bukti pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang dilaksanakan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur adalah Lokakarya dengan tema “menggagas NU masa depan” yang dilaksanakan di Hotel Green SA Juanda Sidoarjo yang dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Mei 2013. Kegiatan selanjutnya berupa Seminar Nasional dengan tema “potensi ekonomi islam dan praktik penegakan hukum dalam peningkatan kesejahteraan umat” yang dilaksanakan di Gedung Empire Palace pada tanggal 11 Mei 2013. Dan yang terakhir kegiatan Seminar keagamaan dengan tema “urgensi aswaja dalam menjaga keutuhan NKRI” yang dilaksanakan di gedung PWNU Propinsi Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 2013.

Secara umum kegiatan-kegiatan tersebut merupakan upaya sistematis yang dilakukan PWNU Propinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi masyarakat agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya dalam masyarakat. PWNU Propinsi Jawa Timur telah melaksanakan pendidikan demokrasi dengan baik. Sebagaimana gagasan pendidikan demokrasi menurut Fuad Fachrudin (Fuad, 2006:43-45) Membentuk warga negara “politik” : warga negara yang percaya, setia, menjunjung tinggi dan mendukung nilai-nilai demokrasi dan menjadi warga negara yang efektif atau terpelajar secara politik. (Conley, 1993;Pring, 1999) dan Memberikan seperangkat nilai-nilai inti demokrasi atau sikap demokratis seperti menghormati perbedaan yang masuk akal, pandangan

berbeda dan harga diri manusia, menghargai hak minoritas, sikap peduli terhadap orang lain, keadilan, partisipasi, kebebasan sebagai syarat warga negara untuk menciptakan masyarakat demokratis, saling menghormati, kerjasama, pentingnya hukum, dan fasilitas individual dalam membuat penilaian politis terhadap isu kontroversial dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut diperlukan untuk membentuk dan mempertahankan komunitas atau masyarakat demokratis. (Dyngneson, 2001)

Adapun dalam praktiknya untuk mengembangkan gagasan demokrasi atau pendidikan demokrasi secara luas ada beragam cara yang dilakukan. Strategi yang dilakukan PWNU dalam mengembangkan warga nahdliyin dan warga lainnya sebagai warga negara yang demokratis dilakukan melalui media massa dan melakukan berbagai kegiatan. PWNU Propinsi Jatim menggunakan media massa untuk melaksanakan strategi pendidikan demokrasi. Media massa ini di maksudkan untuk menggali persepsi dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan melakukan interaksi, informasi dan komunikasi dengan masyarakat, selain itu juga untuk memberi informasi atas permasalahan yang dihadapi umat, baik sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Dari sinilah akan diketahui secara jelas akar, alur, dan konteks sebuah ajaran itu tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan strategi pendidikan demokrasi yang dilakukan oleh PWNU Propinsi Jawa Timur terhadap masyarakat, PWNU Jatim menggunakan media untuk membantu pendidikan demokrasi antara lain melalui majalah bulanan “AULA” yang diterbitkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur sejak tahun 1978. Sepuluh tahun kemudian, majalah ini mendapat Surat Izin Terbit Menteri Penerangan 1987. Penerbitan majalah ini berkantor di PWNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al-Akbar Timur No.9 Surabaya. Selanjutnya Harian Umum Duta Masyarakat adalah kora harian yang diterbitkan oleh masyarakat Nahdliyin pada masa Orde Lama, sekitar tahun 1954. Adapun alamat redaksi harian Duta di Gedung Astra Nawa Jl Gayung Sari timur 35, Surabaya, Jawa Timur. Harian Umum Duta Masyarakat, merupakan Koran harian yang beredar di sebagian besar kota di Jawa Timur dan Jakarta. Memiliki segmentasi pembaca yang meliputi seluruh umat muslim, mulai dari kalangan menengah sampai kebawah. Dan yang terakhir melalui TV9 yang dikelola oleh PT.Dakwah Inti Media. Perusahaan yang dimiliki organisasi sosial keagamaan PWNU Jawa Timur. TV9 telah memperoleh izin Tetap Penyelenggaraan Penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tertanggal 23 Juli 2012 untuk melakukan siaran di kanal 42 sebagai lembaga

penyiaran swasta di Surabaya/Jawa Timur. Kantor TV9 beralamatkan Jl Raya Darmo 96, Surabaya, Jawa Timur.

Media yang di bentuk oleh PWNU Jawa Timur menjadi penting karena memang memiliki kekuatan. Media cetak dan elektronik memiliki keunggulan, keunggulannya antara lain mudah dijangkau oleh masyarakat. Program ini di maksudkan untuk menggali persepsi dan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan melakukan interaksi, informasi dan komunikasi dengan masyarakat, selain itu juga untuk memberi informasi atas permasalahan yang dihadapi umat, baik sosial-budaya, ekonomi, maupun politik. Bukan sekedar mampu menyampaikan pesan kepada khalayak tetapi lebih karena menjalankan fungsi mendidik, mempengaruhi, menginformasikan dan menghibur. Dengan fungsi demikian maka media yang telah dibentuk memiliki potensi untuk membangkitkan kesadaran, mengubah sikap, pendapat atau persepsi masyarakat terhadap sesuatu hal khususnya berkaitan dengan demokrasi.

Arti penting pendidikan demokrasi bagi PWNU Propinsi Jawa Timur.

Pendidikan demokrasi yang di maknai oleh PWNU Propinsi Jatim adalah sebagai upaya menyebarkan paham *Ahlussunnah wal jama'ah*, karena nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya sama dengan inti ajaran ASWAJA, *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (keseimbangan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Pendidikan demokrasi melalui pemahaman nilai Aswaja menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, serta dilengkapi dengan sistem ke-organisasian Nahdlatul Ulama.

Bagi NU pendidikan demokrasi penting dalam konteks bagaimana NU mentransformasikan dirinya dari pemahaman *Ahlussunnah wal jama'ah*, menyebarkan gagasan *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (keseimbangan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) kepada masyarakat luas, menumbuhkan kesadaran politik, dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka untuk berkomunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, saling

menghargai, kebersamaan, percaya diri, mampu mengekang diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

Pemahaman tentang paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah sangat penting bagi warga NU, Karena Aswaja merupakan asas fundamental NU dalam membangun gerakan dan berkhidmat kepada umat. Dengan sendirinya seluruh metode berpikir (*manhaj al-fikri*) dan metode pergerakan (*manhaj al-haraki*) warga, terutama pengurus NU dan lembaga di bawahnya, harus merujuk kepada konsep dan semangat Aswaja.

Tawassuth dan *I'tidal* adalah sebuah sikap keberagamaan yang tidak terjebak pada titik-titik ekstrem. Sikap yang mampu menjumput setiap kebaikan dari berbagai kelompok. Kemampuan untuk mengapresiasi kebaikan dan kebenaran dari berbagai kelompok memungkinkan pengikut Aswaja untuk tetap berada di tengah-tengah dan adil.

Tasammuh adalah sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang menerima kehidupan sebagai sesuatu yang beragam. Keragaman hidup menuntut sebuah sikap yang sanggup untuk menerima perbedaan pendapat dan menghadapinya secara toleran. Toleransi yang tetap diimbangi oleh keteguhan sikap dan pendirian.

Tawazun artinya seimbang. Keseimbangan adalah sebuah sikap keberagamaan dan kemasyarakatan yang bersedia memperhitungkan berbagai sudut pandang dan kemudian mengambil posisi yang seimbang dan proporsional. Sebagaimana sikap *tawassuth*, *tawazun* juga menghendaki sebuah sikap keberagamaan yang tidak terjebak pada titik-titik ekstrem, misalnya kelompok keagamaan yang terlalu terpaku kepada masa lalu sehingga umat Islam sekarang hendak ditarik ke belakang mentah-mentah sehingga bersikap negatif terhadap setiap ikhtiar kemajuan. Atau sebaliknya, kelompok keagamaan yang menafikan seluruh kearifan masa lalu sehingga tercerabut dari akar sejarahnya. Aswaja menghendaki sebuah sikap tengah-tengah agar tidak terjebak ke dalam ekstremitas.

Amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah sebuah konsekuensi dari keyakinan kita terhadap kebenaran Islam ala *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Saat ini banyak kelompok Islam yang sikap keberagamaannya tidak menunjukkan moderasi ala Aswaja tapi mengaku-aku Aswaja. *Amar ma'ruf nahi munkar* ditujukan pada siapa saja, muslim maupun non-muslim, yang melakukan kemungkaran dengan menebar perilaku dengan menggunakan kekerasan, menyebarkan rasa permusuhan, kebencian dan perasaan tidak aman, serta menghancurkan keharmonisan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Jika kita memeras kembali keempat nilai ideal tersebut, maka kita akan menemukan satu kata, yaitu

moderat yang berarti seimbang, proporsional, dan toleran. Sikap keberagaman dan kemasyarakatan yang moderat ini melandasi seluruh ajaran Aswaja sejak dulu. Dengan mendasarkan pada semangat inti ajaran ASWAJA yaitu, *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (keseimbangan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) akan menciptakan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis sebagai sebuah masyarakat yang menganut nilai-nilai toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka untuk berkomunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, saling menghargai, kebersamaan, percaya diri, mampu mengekang diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain

Keseluruhan tujuan dilaksanakannya pendidikan demokrasi dalam persepsi PWNU Propinsi Jawa Timur dapat disimpulkan untuk menjadikan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis sebagai sebuah masyarakat yang menganut nilai-nilai toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka untuk berkomunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, saling menghargai, kebersamaan, percaya diri, mampu mengekang diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal jama'ah*. Dalam pandangan PWNU Propinsi Jawa Timur paham *Ahlussunnah wal jama'ah* berfungsi sebagai pedoman untuk membangun hubungan di antara masyarakat, penguasa (negara), dan warga negara.

PENUTUP

Simpulan

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur mengaktualisasikan pendidikan demokrasi yang dilaksanakan dalam berbagai kegiatan, yaitu : (1) Konferensi Tingkat Wilayah (Konferwil); (2) Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil); (3) Dakwah ; (4) Seminar, pelatihan kader dan diskusi terbuka dalam rangka memperingati hari besar Islam, Haul Kyai NU dan Hari lahir Nahdlatul Ulama. Dalam kaitannya dengan strategi pendidikan demokrasi PWNU Jatim menggunakan media massa atau sarana untuk membantu pendidikan demokrasi antara lain melalui Harian Umum Duta Masyarakat , majalah bulanan "AULA", dan yang terakhir melalui TV9.

Bagi NU pendidikan demokrasi penting dalam konteks bagaimana NU mentransformasikan dirinya dari

pemahaman *Ahlussunnah wal jama'ah*, menyebarluaskan gagasan *tawassuth* (tengah-tengah) , *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleran), *tawazzun* (keseimbangan), dan *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) kepada masyarakat luas, untuk menjadikan masyarakat demokratis. Masyarakat demokratis sebagai sebuah masyarakat yang menganut nilai-nilai toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka untuk berkomunikasi, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia, saling menghargai, kebersamaan, percaya diri, mampu mengekang diri, tidak menggantungkan diri pada orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain yang sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal jama'ah*.

Saran

Dari berbagai data dan fakta yang diperoleh pada penelitian ini, maka saran yang bisa diberikan sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. PWNU sebagai organisasi sosial keagamaan, senantiasa terus konsisten dan meningkatkan sosialisasi nilai-nilai atau gagasan demokrasi yang tercermin dalam paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* agar masyarakat dapat mudah memahami dan mentransformasikan ajaran *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dalam seluruh aspek kehidupan.
2. PWNU propinsi Jawa Timur hendaknya meningkatkan manajemen organisasi dan kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan umat agar terwujud manajemen organisasi dan kepemimpinan yang profesional dan terstruktur.
3. Hendaknya meningkatkan manajemen informasi dan komunikasi agar dapat mempermudah mengakses sosialisasi program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh PWNU agar dapat di jangkau oleh masyarakat khususnya warga Nahdliyin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Aziz RS.1995.*Konsepsi Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Bidang Aqidah dan Shari'ah*, cet. 1.Pekalongan: CV. Bahagia
- Azra, Azumardi.2001.*Paradigma Baru Pendidikan Nasional : Rekonsiliasi dan Demokratisasi*.Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Budiardjo, Miriam.2005.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fachruddin,Fuad.2006. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alfabet.

- Fealy,Greg,WahabChasbullah.1997.Tradisionalisme dan Perkembangan Politik NU, dalam Greg Fealy & Greg Barton (ed). *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, LKiS. Yogyakarta.LKiS.
- Feillard, Andree.1994.*Nahdlatul Ulama dan Negara: Fleksibilitas, Legitimasi dan Pembaharuan, dalam Ellyasa KH. Darwis (ed.), Gus Dur dan Masyarakat Sipil*.Yogyakarta.LKiS.
- _____.1999.*NU Visa a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*.Yogyakarta.LKiS
- Mahfud MD, Moh.2000. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moesa, Ali Maschan. 1999.*Kiai Dan Politik Dalam Wacana Civil Society* .Surabaya. LEPKISS
- Moleong, J, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar,Masyhudi.2007.*Aswaja An-Nahdliyah*.Surabaya: Khalista.
- Musa, Ali Masykur.2010.*NU dan Moralitas Politik Bangsa*.Jakarta: Telaga Bijak.
- Rosyada, Dede.dkk. 2003.*Pendidikan Kewargaan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Saifudin, Asep Chalim.2012. *Membumikan Aswaja, Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista.
- Sugiyono.2010.*Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ubaidillah, A. Dan Rozak, A. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Winarno.2008. *Pardigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zamroni.2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.